

SYSTEM OF EDUCATION FINANCIAL RECORDING (EMPIRICAL STUDY AT “SMK LABOR” FKIP OF RIAU UNIVERSITY)

Gimin¹ dan Sri Kartikowati²
Universitas Riau¹, Universitas Riau²
 1. gim_umri@yahoo.co.id,
 2. tikowati@lecturer.umri.ac.id

ABSTRACT

Many schools count the cost of educating each student for one year (unit cost) as a measure of efficiency, but the phenomenon shows cannot describe the real costs are charged to period. This study analyzed the system of financial recording for education, formula calculation unit cost, and amount of unit cost. The study was conducted on "SMK Labor" FKIP of Riau University. Main data was in the form of documents, and more focus information gathered by interviews to some key source persons. Data was analyzed descriptively, classified based on subject-matters. The study found "SMK Labor" FKIP of Riau University perform financial recording system using a cash basis on RKAS (School Budget and Activity Plan). This school uses a formula calculating the unit cost "all expenses paid by each student is reduced BOS funds for each student until graduation divided the study period". Unit cost "SMK labor" FKIP of Riau University is unstable, that is Rp2.460.000 in 2014, increase to Rp2.520.000 in 2015 and 2016. The formula calculation unit cost "SMK labor" less reflecting the cost real of education was charged to students because the school has not added any reduction in the value of fixed assets of the school, such as depreciation of equipment, and others. Therefore it is necessary to develop the appropriate accounting model of education.

Kata Kunci: accounting, financial, education, unit cost

I. PENDAHULUAN

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu negara. Oleh sebab itu melalui berbagai upaya, pemerintah bersama masyarakat Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini UU 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Disisi lain UU 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasar standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolahsekolah secara individual (Myers dan Stonehill, 1993, Abu, Ibtisam dan Duhou, 1999). Ini berarti sekolah memiliki kebebasan mengelola keuangan sekolah sesuai kebutuhannya.

Sekolah merupakan unit usaha jasa yang harus melakukan pencatatan keuangannya menggunakan akuntansi. Ini seperti dinyatakan Indra Bastian (2017) bahwa salah satu dari bidang utama dari akuntansi sektor publik adalah “akuntansi pendidikan: sekolah atau perguruan tinggi”. Akan tetapi fenomena yang ada saat ini sekolah belum melakukan sistem pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan yang dilakukan sekolah adalah (a) inventarisasi aset sekolah dari sisi jumlah dan kondisi fisik (baik/buruk), dan (b) pembiayaan pendidikan dari sisi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Ini seperti dinyatakan Gimin (2015) dalam makalahnya yang berjudul “AKUNTANSI PENDIDIKAN (Suatu Pemikiran Implementasi di Sekolah)” bahwa “Melalui kebijakan pemerintah tentang MBS, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Akan tetapi untuk mengukur mutu pendidikan di sekolah dengan tepat masih kesulitan data, karena di sekolah belum

menggunakan sistem pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh sekolah saat ini meliputi inventarisasi aset sekolah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang saat ini diberi nama RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) tidak bisa menunjukkan besarnya biaya pendidikan secara baik, karena RKAS tidak mengalokasikan pembebanan biaya sesuai pengorbanannya akan tetapi membebankan biaya berdasarkan tanggal transaksi itu terjadi (*cash basis*). Dengan kondisi tersebut, maka RKAS kurang bisa digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas keberhasilan pendidikan suatu sekolah dibanding sekolah lain. Ini seperti dinyatakan MyWord (2015) bahwa “dalam sistem akuntansi berbasis kas, biaya pengadaan aset dibebankan ke periode saat dilakukan pembayaran atas harga aset”. Sehubungan dengan itu Gimin (2015) menyatakan bahwa “pada metode *cash basis*, memiliki beberapa kelemahan untuk mengukur mutu pendidikan kaitanya dengan beban yang dikeluarkan, karena dalam pendidikan seringkali aset pendidikan (misal komputer) dibeli dan digunakan untuk beberapa periode akuntansi”. Transaksi ini dalam RKAS dengan sistem *cash basis* nilai komputer tersebut dibebankan sebagai biaya untuk 1 periode (1 tahun) pada periode pembayaran. Kondisi ini akan berdampak sulitnya menghitung *unit cost* pendidikan (biaya pendidikan per-siswa/tahun). Padahal pengorbanan sarana dan prasarana di satuan pendidikan itu dalam akuntansi pendidikan dapat diperhitungkan sebagai biaya menggunakan pendekatan *accrual basis* dalam RKAS-nya. Ini seperti dinyatakan Budi Mulyana (2017) bahwa “penggunaan basis akrual tidak hanya untuk penyusunan laporan keuangan, di beberapa negara telah menggunakan basis akrual baik untuk penyusunan laporan keuangan maupun untuk penganggaran (misalnya, Selandia Baru, Australia, Inggris)”.

SMK labor merupakan sekolah binaan FKIP Universitas Riau untuk mengembangkan sumberdaya manusia, dan sebagai sarana penelitian dalam mengembangkan pendidikan. Sehubungan dengan itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang: (1) sistem pencatatan keuangan pendidikan, (2) formula perhitungan *unit cost* (biaya pendidikan/ siswa/tahun), dan (3) besarnya *unit cost* SMK labor binaan FKIP Universitas Riau. Informasi penelitian ini bermanfaat sebagai dasar dalam mengembangkan sistem pencatatan keuangan pendidikan yang dapat memberikan perhitungan pembebanan biaya sesuai pengorbanannya, dan pada gilirannya dapat memperhitungkan biaya pendidikan per-siswa (*unit cost*) secara riil, serta dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pencatatan keuangan pendidikan, formula perhitungan *unit cost*, dan besarnya *unit cost*.

Menurut UU nomor 20 tahun 2003 sumber pendapatan sekolah dikelompokkan menjadi 2, yaitu: (1) sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan (2) sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat, yang mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah” (Penjelasan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 3). Informasi tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dibayar oleh orang tua siswa merupakan sebagian dari pendapatan sekolah yang akan dikorbankan sebagai biaya pendidikan dalam mencapai tujuan sekolah.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19/2005, pendapatan sekolah dikelola menjadi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini elemen pengeluaran sekolah dikelompokkan menjadi 2 macam biaya seperti berikut: (1) Biaya investasi; yang mencakup: penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, modal kerja tetap lainnya, (2) Biaya operasional; meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa: daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. (PP nomor 19/2005 pasal 62 ayat 1).

Melihat kelemahan sistem *cash basis* seperti dijelaskan di atas, serta pentingnya alat ukur efisiensi lembaga pendidikan, maka biaya pendidikan perlu dihitung dari seluruh pengorbanan sekolah itu baik yang bersumber dari dana orang tua, pemerintah, dan masyarakat menggunakan sistem *accrual basis* melalui penerapan akuntansi pendidikan. Dengan sistem ini dapat dihitung besaran *unit cost* sesuai pengorbanan sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikannya.

Pendidikan merupakan badan usaha nirlaba. Ini seperti dinyatakan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 53 ayat 3 bahwa Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan



(UU nomor 20 tahun 2003). Karena pendidikan merupakan badan usaha nirlaba, maka akuntansi yang digunakan adalah akuntansi publik. Penggunaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan. Penggunaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pembiayaan sekolah, serta menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan pendidikan.

Menurut Sbastian (2007), definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pandang pemakai; akuntansi merupakan disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien, serta mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. *Kedua*, dari sudut pandang proses kegiatan; akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Definisi kedua ini menggambarkan tahapan akuntansi seperti berikut.

- (1) Tahap Pencatatan; pada tahap ini kegiatannya meliputi: pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi, pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal, serta memindahbukukan (*posting*) dari jurnal ke dalam akun buku besar.
- (2) Tahap Pengikhtisaran; pada tahap ini kegiatannya meliputi: penyusunan neraca saldo (*trial balance*) berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian (*adjusting entries*), penyusunan kertas kerja (*work sheet*), serta pembuatan ayat Jurnal penutup (*closing entries*).
- (3) Tahap Pelaporan; pada tahap ini kegiatannya meliputi: menyusun Laporan Surplus/Defisit, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Khususnya dalam pelaporan surplus/defisit, maka sekolah harus melakukan sistem pencatatan tentang pendapatan dan biaya pendidikan yang memenuhi prinsip akuntansi sehingga dapat dihitung *unit cost* dengan benar. *Unit cost* pendidikan pada dasarnya merupakan biaya pendidikan per-siswa/tahun, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun negara.

Dalam akuntansi, ada 2 sistem pengakuan atas pendapatan dan biaya, yaitu: (1) *cash basis* (berbasis kas), dan (2) *accrual basis* (berbasis akrual). Dalam metode *cash basis*, pendapatan sekolah diakui pada saat menerima uang, sedangkan biaya pendidikan diakui pada saat melakukan pembayaran. Ini seperti dinyatakan MyWord (2015) bahwa dalam metode *single entry* atau *cash basis* pencatatan dan pengakuan peristiwa dilakukan saat pembayaran dilakukan. Pada metode yang pertama (*cash basis*), memiliki beberapa kelemahan untuk mengukur mutu pendidikan kaitanya dengan beban yang dikeluarkan karena aset dalam pendidikan (misal komputer) akan digunakan untuk beberapa periode akuntansi. Dalam hal ini Gimin (2015) menyatakan untuk mengukur mutu pendidikan kaitanya dengan biaya yang dipikul, maka dalam akuntansi pendidikan sangat cocok menggunakan metode *accrual basis* sehingga lebih realistis untuk mengukur *unit cost*. Hal ini sejalan dengan MyWord (2015) yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Begitu juga Budi Mulyana (2017) menyatakan bahwa "Akuntansi akrual dapat menyajikan informasi seluruh posisi keuangan yang terdiri dari posisi aset, utang dan kekayaan bersih dari suatu entitas". Lebih jauh dinyatakan bahwa dalam penggunaan akrual basis "Identifikasi aset dan pengakuan penyusutan membantu manajer untuk memahami pengaruh dari penggunaan aset tetap dalam memberikan pelayanan dan mendorong manajer untuk mempertimbangan alternatif-alternatif cara untuk mengelola biaya dan pemberian pelayanan".

II. METODE PENELITIAN

SMK Labor binaan FKIP Universitas Riau sebagai obyek penelitian ini berlokasi di Jalan Thamrin nomor 97, Pekanbaru. SMK Labor merupakan binaan FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Universitas Riau, dan digunakan sebagai tempat kajian pengembangan pendidikan oleh FKIP Universitas Riau. Ini merupakan penelitian deskriptif karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi tentang gambaran dari obyek penelitian. Data utama dalam bentuk dokumen dan informasi terfokus yang diperoleh melalui wawancara beberapa nara sumber relevan yaitu kepala sekolah, bagian aset sekolah, dan bagian keuangan sekolah (SMK), serta sumber lain yang terkait. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dan diklasifikasikan berdasarkan subyek pokok masalah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN



Berikut adalah hasil penelitian sistem pencatatan keuangan pendidikan di SMK Labor Binaan FKIP Universitas Riau beserta pembahasannya.

Hasil Penelitian

Sehubungan dengan hasil penelitian sistem keuangan pendidikan ini disajikan dalam 3 bagian, yaitu (1) gambaran umum, (2) sistem pencatatan keuangan pendidikan, dan (3) perhitungan *unit cost* seperti berikut.

1. Gambaran Umum SMK Labor Binaan FKIP Universitas Riau

SMK Labor binaan FKIP Universitas berlokasi di Jalan Thamrin no 97, Pekanbaru. Sekolah ini dibina oleh 32 orang guru dengan sebaran seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Sebaran Guru SMK Labor berdasar Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Guru			Jumlah (%)
	PNS	GT Yays	GTT	
S3				
S2	1			1
S1	1	11	18	30
Belum S1		1		1
Jumlah	2	12	18	32

Sumber: SMK Labor per Okt 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa SMK Labor binaan FKIP Universitas Riau memiliki guru yang sudah memenuhi persyaratan yaitu minimal S1 yang mencapai 30 dari 32 orang (96,87%), bahkan sudah ada yang berkualifikasi magister (S2) sebanyak 3,13%. Disisi lain sekolah ini memiliki kekuatan yang tinggi dalam mengoperasikan kegiatannya dimana 30 dari 32 orang (93,75%) merupakan guru yayasan dan guru tidak tetap (GTT) tanpa guru bantu baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. Kondisi ini dengan sendirinya kompensasi mereka menjadi tanggungan sepenuhnya sekolah/yayasan tersebut.

SMK Labor binaan FKIP Universitas memiliki 5 program keahlian dengan sebaran jumlah siswa masing-masing seperti berikut.

Tabel 2. Sebaran Jumlah Siswa SMK Labor per-September 2016

No	Program Keahlian	Jumlah Siswa Kelas:			Jumlah
		X	XI	XII	
1	Akuntansi	89	82	64	235
2	Administrasi Perkantoran (ADP)	82	52	63	197
3	Pemasaran	18	17		35
4	Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	24	18	25	67
5	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)	27	16	20	63
	Jumlah	240	185	172	597

Sumber: SMK Labor per-Okt 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa program keahlian Akuntansi, ADP menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam menempuh pendidikan di SMK. Sedangkan program keahlian pemaasaran memiliki peminat yang paling kecil dibanding program keahlian lainnya di SMK Labor binaan FKIP Universitas Riau.

2. Sistem Pencatatan Keuangan Pendidikan SMK Labor Binaan FKIP Universitas Riau

Dalam hal pencatatan keuangan pendidikan, SMK labor binaan FKIP Universitas Riau menggunakan model *cash basis*. Dalam hal ini SMK labor melakukan pencatatan keuangan (pendapatan dan pembebanan biaya) atas dasar tanggal transaksi berdasar RKAS yang telah

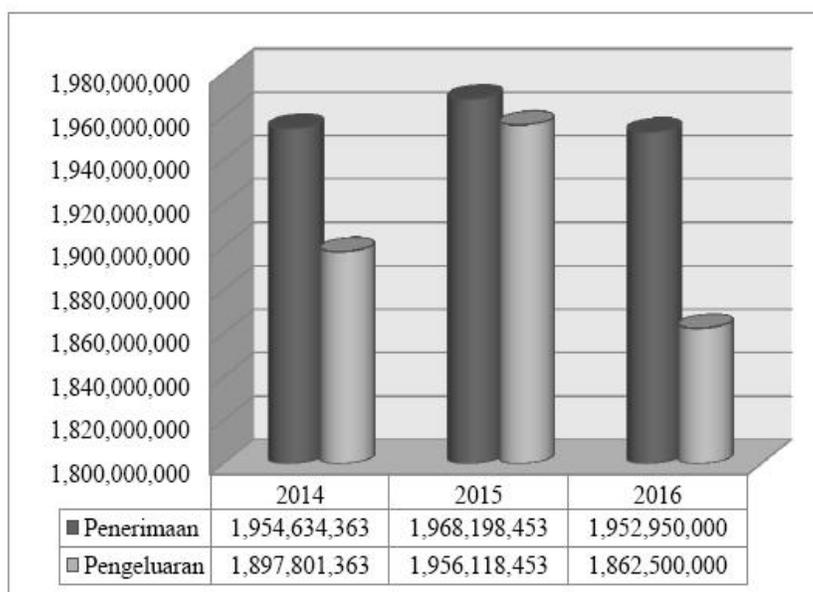
disusun dan disepakati. SMK Labor binaan FKIP Universitas Riau biasanya melakukan penyusunan RKAS sekitar bulan Juni sebelum tahun buku. RKAS disusun melalui rapat di bawah pimpinan Kepala sekolah yang melibatkan beberapa komponen berikut:

- (1) Semua wakil kepala sekolah
- (2) Ketua program keahlian (Keta jurusan)
- (3) Semua guru SMK Labor
- (4) Pembina OSIS, diwakili oleh Pembina ekstra kulikuler, serta
- (5) Komite sekolah

RKAS yang sudah disepakati akhirnya disyahkan oleh pihak-pihak terkait, yaitu: Kepala sekolah, Komite sekolah, dan Manajemen sekolah. Sebagai sumber penerimaan utama SMK Labor meliputi 5 komponen seperti berikut:

- (1) uang SPP,
- (2) uang OSIS
- (3) uang pembangunan
- (4) uang prakerin/magang, serta
- (5) dana BOS

Selama 3 tahun terakhir (tahun 2015-2016), penerimaan SMK Labor per-tahun berkisar 1,9 milyar dengan sebaran seperti pada gambar berikut.



Sumber: SMK Labor per Okt 2016

Gambar 4.1. Perkembangan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran SMK Labor Binaan FKIP Universitas Riau tahun 2014-2016

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan SMK Labor selama 3 tahun (2014-2016) tidak stabil. Hal ini disebabkan jumlah siswa yang tidak stabil (lihat tabel perkembangan siswa). Penerimaan SMK tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan SMK Labor seperti tercantum dalam RKAS. Dari gambar di atas menunjukkan pengeluaran SMK Labor 3 tahun terakhir (tahun 2014-2016), perkembangannya juga tidak stabil (1862-1,956 milyar). Pengeluaran tersebut secara garis besar meliputi 20 komponen, seperti berikut.

- (1) Renovasi Gedung
- (2) Peralatan Sarana dan Prasarana
- (3) Biaya Pengadaan Buku
- (4) Biaya ISO
- (5) Pengadaan bahan Praktek Siswa
- (6) Pengadaan peralatan Praktek Siswa

- (7) Perbaikan Sarana dan Prasarana
- (8) Perlengkapan Pustaka
- (9) Gaji guru dan karyawan
- (10) Photo copy
- (11) Biaya Adiwiyata
- (12) Biaya Ekstrakurikuler
- (13) Konsumsi
- (14) Biaya Listrik dan Telpon
- (15) Biaya Media Masa
- (16) Biaya Camping
- (17) Biaya Ulah SMK Labor
- (18) Biaya Ulah Prov. Riau,
- (19) HUT RI
- (20) Biaya Lain-Lain

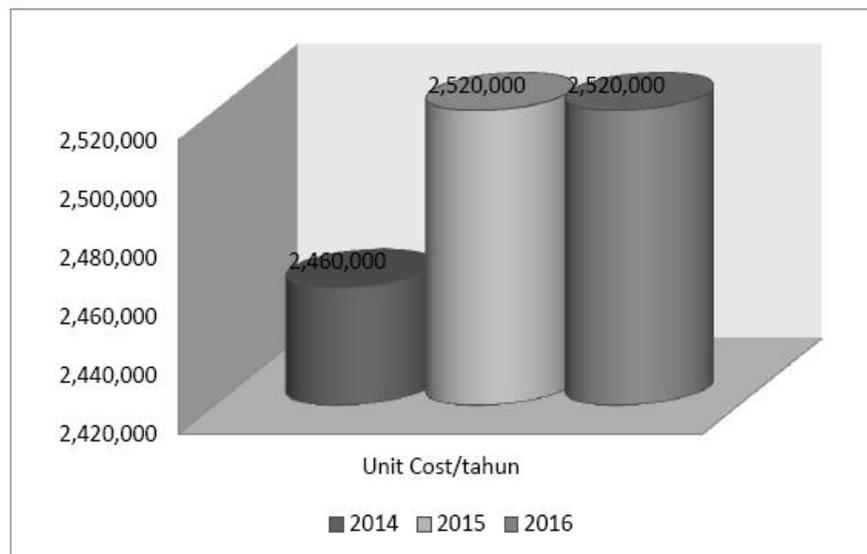
3. Perhitungan Unit cost di SMK Labor Binaan FKIP Universitas Riau

Hasil angket maupun wawancara dengan kepala sekolah, bagian aset, maupun bagian keuangan menjelaskan bahwa SMK labor melakukan perhitungan biaya pendidikan. Menurut SMK labor biaya pendidikan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada siswa sampai lulus dibagi dengan lama sekolah, atau dengan formula seperti berikut.

$$\text{Unit cost} = \frac{\text{Biaya yang dibebankan sekolah kpd siswa sampai lulus}}{\text{lama sekolah}}$$

Catatan: Dalam hal ini biaya yang dibebankan sekolah kepada siswa di SMK Labor pada tahun 2016 meliputi: SPP/bulan ditambah uang pembangunan fisik 1 kali sampai lulus. Selanjutnya karena setiap siswa mendapat bantuan dana BOS dari pemerintah, maka besarnya SPP yang dibayar siswa kepada sekolah adalah setelah dipotong dengan besarnya dana BOS/siswa (yaitu: Rp360.000 – Rp140.000=Rp220.000).

Adapun perkembangan besarnya “biaya pendidikan per-siswa per-tahun” (*unit cost*) di SMK Labor sesuai konsep tersebut, selama 3 tahun terakhir (tahun 2014-2016) adalah seperti berikut.



Sumber: SMK Labor per Okt 2016

Gambar 4.2. Perkembangan Biaya pendidikan/siswa/per-tahun (*unit cost*) SMK Labor Binaan FKIP Universitas Riau tahun 2014-2016

Dari gambar di atas menunjukkan biaya pendidikan per-siswa (*unit cost*) pada tahun 2015 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2016 tetap dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam hal ini kenaikan *unit cost* di SMK Labor terjadi pada tahun 2015 sebesar 24,39% (dari Rp 2.460.000 menjadi Rp 2.520.000). Kenaikan *unit cost* pada tahun 2015 ini antara lain disebabkan adanya kenaikan biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa pada tahun itu seperti uang pembangunan fisik.

Dalam kaitan dengan perhitungan biaya pendidikan ini, SMK Labor tidak membebankan biaya atas pengorbanan aktiva tetap secara proporsional, akan tetapi sebesar biaya pembangunan fisik yang dibebankan kepada siswa yang baru masuk (siswa baru).

Pembahasan

SMK Labor binaan FKIP Universitas Riau merupakan salah satu SMK swasta di Kota Pekanbaru yang memiliki perkembangan cukup baik, karena dari hasil penelitian menunjukkan sekolah dengan 5 program keahlian ini memiliki guru yang *qualifide* dan animo masyarakat yang tinggi. Khususnya untuk program keahlian akuntansi, dan administrasi perkantoran setiap tahun mengalami perkembangan dan pada kelas X mencapai 89 dan 82.

SMK Labor Binaan FKIP Universitas Riau ini melakukan sistem pencatatan keuangannya menggunakan RKAS untuk mencatat jumlah dan jenis sumber penerimaan, serta komponen-komponen pengeluarannya. Ini senada dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 53 ayat 2k, bahwa:

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kalender pendidikan ...

...
k. *Anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun*

Lebih lanjut pada penjelasan pasal 53 ayat 2 menyatakan bahwa RAPBS harus bersifat komprehensif yang meliputi sumber dan alokasi penggunaan biaya untuk satu tahun yang secara akuntabel dan transparan diketahui oleh orang tua/wali murid peserta didik.

SMK Labor binaan FKIP Universitas Riau menghitung biaya pendidikan per-siswa per-tahun (*unit cost*) yang kurang sesuai karena tidak memasukan biaya pembangunan fisik dari sumber dana selain siswa ke dalam perhitungan *unit cost*. Kondisi ini kurang sesuai dengan pernyataan para ahli berikut.

- (1) Serato & Melnik (1995), Clark dkk (1998) serta Muljoatmodjo (2001) yang menggunakan "*konsep biaya pendidikan sebagai biaya untuk proses pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah (sesuai anggaran)*".
- (2) Tim peneliti Universitas Pendidikan Indonesia yang bekerjasama dengan Biro Keuangan Sekjen Depdiknas (2001), bahwa "*konsep biaya pendidikan sebagai biaya yang berasal dari pemerintah (sesuai anggaran) dan pengeluaran yang dilakukan oleh siswa bersama keluarganya dalam menopang pendidikan tersebut, seperti: beli buku, les, uang saku, transportasi ke/dari sekolah, dan lainnya*".
- (3) Coombs (1987), dalam bukunya yang berjudul *cost analysis in education* menjelaskan bahwa *biaya pendidikan termasuk di dalamnya adalah biaya penyusutan atau depresiasi*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti dijelaskan di atas dapat diberikan kesimpulan seperti berikut. SMK Labor binaan FKIP Universitas Riau memiliki sumberdaya manusia yang *qualified* dan guru sebagai sumberdaya utama dalam pendidikan yang memadai, baik dilihat dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dalam hal sistem pencatatan keuangan, SMK ini menggunakan pendekatan *cash basis* berdasar RKAS yang telah disusun dengan melibatkan orang-orang terkait yaitu: semua wakil kelapa sekolah, ketua program keahlian, guru, pembina OSIS, dan komite sekolah. Sekolah ini melakukan perhitungan *unit cost* dengan cara menjumlahkan seluruh pendidikan yang dibebankan kepada siswa hingga lulus dikurang BOS, dibagi dengan lama studinya. Perhitungan



ini kurang menggambarkan kondisi riil pengorbanan aset yang digunakan dalam mendidik siswa tersebut yang disebabkan tidak memperhitungkan beban penyusutan aset yang digunakan. Oleh sebab itu *unit cost* ini sulit digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi biaya pendidikannya dibanding sekolah-sekolah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, disarankan: (1) perlunya pengembangan model akuntansi pendidikan oleh para peneliti, (2) perlunya pengembangan penetapan formula perhitungan *unit cost* dalam pendidikan dari pengambil kebijakan, (3) perlunya penetapan penerapan akuntansi pendidikan di sekolah yang tetap dari pengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ibtisam dan Duhou, 1999. *School-Based Management*. Terjemahan Oleh: Noryamin Aini, dkk. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Budi Mulyana. 2017. Penggunaan Akuntansi di negara-negara lain: Tren di negara-negara anggota OECD. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-berbasis-akrual.pdf>. Download 4 Mare 2017.
- Coombs, P.H. & Hallak, J.. 1987. *Cost Analysis in Education: A Tool for Policy and Pranning*. London: The Word Bank
- Gimin. 2015. AKUNTANSI PENDIDIKAN (Suatu Pemikiran Implementasi di Sekolah). Prosiding: Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan. Sabtu 24 Oktober 2015 di Indraprasta Ballroom Pusdiklat
- Indra Bastian (2017). Lingkup Akuntansi Sektor Publik (Modul 1). <http://repository.ut.ac.id/3858/1/EKSI4207-M1.pdf>. Down load 4 Maret 2017
- Tris, Dodi. 2012. Referensi Akuntansi: Akuntansi dalam Dunia Pendidikan. Diakses dari <http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/07/akuntansi-dalam-dunia-pendidikan.html> pada tanggal 6 Oktober 2015
- Myers, Doronhy dan Stonehill, Robert. 1993. *School-Based Management. Office of Research Education: Consumer Guide*. Diakses dari ([http://www.ed.gov/pubs/OR/ Consumer Guides/index.html](http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/index.html)) pada tanggal 5 Oktober 2015
- MyWord. 2015. *Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik*. Diakses dari <http://ar-alfajri.blogspot.co.id/2013/10/regulasi-dan-standar-akuntansi-sektor.html>. pada tanggal 8 Okt 2015
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- Sbastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Yogyakarta: PT Erlangga.
- Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*